

**TAMBANG RAKYAT TRADISIONAL DI ALIRAN SUNGAI  
JENEBERANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN  
GOWA (KAJIAN ANTROPOLOGI)**



Oleh,  
**LUKMAN SYAM**  
NIM. E042182001

**PROGRAM PASCASARJANA ANTROPOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**TAMBANG RAKYAT TRADISIONAL DI ALIRAN SUNGAI  
JENEBERANG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA  
(KAJIAN ANTROPOLOGI)**

Disusun dan diajukan oleh

**LUKMAN SYAM**

Nomor Pokok E042182001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

pada tanggal **25 Juni 2021**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



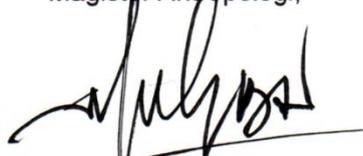
**Prof. Dr. Yamin Sani, MS.**  
NIP. 195011251980031001

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Yahya, MA**  
NIP. 196212312000121001

Ketua Program Studi  
Magister Antropologi,



**Dr. Muh. Basir Said, MA.**  
NIP. 196206241987021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
NIP. 196511091991031008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUKMAN SYAM

NIM : E042182001

Program Studi : (S2) Antropologi

Menyatakan dengan sebenar-benar bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Juni 2021

Yang menyatakan,  
  
**LUKMAN SYAM**

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis berjudul, “Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Kajian Antropologi)” guna memenuhi untuk memperoleh gelar Magister Antropologi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan, dorongan dari orang tua penulis serta bantuan dari banyak pihak, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, ayahanda Syamsuddin Dg. Ngemba dan ibunda Salawati Dg Kamma, yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis melanjutkan studi magister ini. Ucapan yang sama kepada saudara-saudara penulis yaitu Usman Syam, Rismawati Syam, dan Muh. Khaerul Syam atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis bisa sampai pada akhir studi ini.

Banyak pula dukungan yang dari lingkungan kampus almamater penulis melanjutkan studi. Untuk itu, izinkanlah pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada.

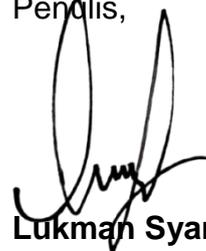
1. Bapak Dr. Muhammad Basir, MA selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Antropologi FISIP UNHAS. Beliau juga banyak memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih banyak untuk kebaikan yang diberi kepada saya Pak selama menjadi mahasiswa. Sekali lagi terimakasih banyak, Pak.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Yamin Sani, MA, pembimbing pertama yang banyak meluangkan waktu untuk penulis untuk konsultasi selama proses mengajukan judul hingga dapat dipertanggungjawabkan di depan para panitia ujian. Terimakasih banyak, Prof.
3. Bapak Dr. Yahya, MA, pembimbing kedua yang penulis lebih banyak merepotkan selama proses pembimbingan hingga tesis telah rapi, terima kasih Pak telah bersedia meluangkan waktu begitu banyak kepada penulis untuk konsultasi berkali-kali, ilmu dan diskusinya, Terimakasih banyak, Pak.
4. Para penguji tesis penulis, Bapak Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA., Bapak Prof. Ansar Arifin, MS, dan Bapak Dr. Muhammad Basir, MA., Terimakasih banyak atas masukan, kritikan, dan saran yang membangun untuk penulis.
5. Staf Departemen dan Fakultas yang selalu saja baik hati dalam segala urusan: Ibu Ira, Pak Irman, Pak Hidayat, Pak Sutamin, Pak Nadir, Pak Idris, Pak Yunus, Ibu Ija, Pak Ancu, Pak Hj Ismail, Pak Mursalim, Pak Anwar, Pak Darwis, Daeng Tompo, dan staf lain yang tidak sempat penulis tulis namanya. Terimakasih banyak.

6. Seluruh informan penulis yang bekerja sebagai penambang pasir di sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Terimakasih banyak telah meluangkan waktu demi kelancaran proses penelitian penulis.
7. Teman seperjuangan di sekolah Pascasarjana, Nunu, Ria, Ian, Wahyu, dan Hafes. Terimakasih banyak kebersamaannya, sekiranya persaudaraan ini dapat tetap terjalin selamanya.

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan dalam ucapan ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Makassar, 25 Juni 2021

Penulis,



**Lukman Syam**

## ABSTRAK

**LUKMAN SYAM.** *Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jene'berang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa: Kajian Antropologi* (dibimbing oleh Yamin Sani dan Yahya).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tambang rakyat di aliran sungai Jene'berang di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain (1) proses pengolahan tambang rakyat di aliran sungai Jene'berang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, penyortiran pasir murni, pengangkutan, dan penjualan (proses-proses ini dilakukan dengan pola penambangan yang masih sangat tradisional pula); (2) upaya penambang tradisional dapat bertahan dari pola penambangan modern dilakukan melalui upaya pemanfaatan sumber daya secara maksimal, menjaga keseimbangan alam, dan pemasokan pasir dari tempat lain; (3) Adapun tantangan penambangan tradisional di sungai Jene'berang meliputi bahan galian pasir yang terbatas, pasang surut air, dan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir sehingga menghambat seluruh proses penambangan pasir dari dasar sungai, sedangkan kelemahannya meliputi kelemahan sumber daya manusia, yakni masyarakat penambang memiliki pendidikan yang rendah, tidak ada jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja, serta kelemahan legalitas perizinan pengelolaan tambang di sungai Jene'berang.

Kata kunci: tambang tradisional, sungai Jene'berang



## ABSTRACT

**LUKMAN SYAM.** *Traditional Community's Mining in Jene'berang River, Somba Opu District, Gowa Regency: An Anthropology Study* (supervised by **Yamin Sani** and **Yahya**)

The aim of this study is to describe the community's mining in the Jene'berang river in Somba Opu District of Gowa Regency.

This research is a qualitative study.

The results of this study indicate that (1) community's mining process in the Jene'berang river, Somba Opu District of Gowa Regency includes prospecting, exploration, exploitation, sorting of pure sand, transportation, and sale carried out using a very traditional mining pattern, (2) the efforts of traditional miners to survive using modern mining pattern are performed by maximizing the use of resources, maintaining natural balance, and supplying sand from other places, and (3) the challenges of traditional mining faced in Jene'berang river include limited sand mining materials, water tides, and rainfall that can cause flooding hampering the entire sand mining process from the riverbed. Meanwhile, the weaknesses include the weaknesses of human resource, i.e. the mining community having low education, lack of health and work safety guarantees, and weaknesses in the legality of mining management permits in Jene'berang river.

Key words: traditional mining, Jene'berang river.



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Konseptual.....	16
1. Hakikat Pertambangan .....	16
2. Asas-Asas Pertambangan .....	19
3. Jenis-Jenis Pertambangan .....	21
4. Pertambangan Pasir .....	22
C. Tinjauan Teoritis .....	32
1. Teori Determinisme dan Posibilisem .....	32
2. Paradigma Ekologi Pada Tambang Rakyat Tradisional.....	39
a. Paradigma Ekologi Budaya.....	39
b. Ekofilosofi Deep Ecology.....	41
c. Paradigma Ekologi Pembangunan Berkelanjutan.....	46
3. Ekologi Budaya.....	49
D. Alur Pemikiran .....	57

BAB III METODE PENELITIAN .....	58
A. Metode Penelitian .....	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	59
C. Pendekatan Penelitian .....	59
D. Sumber Data .....	59
E. Metode Pengumpulan Data .....	60
F. Instrumen Penelitian .....	61
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	61
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKAIS PENELITIAN .....	64
A. Profil Kabupaten Gowa .....	64
B. Profil Kecamatan Somba Opu .....	87
1. Curah Hujan .....	90
2. Kerentanan Banjir .....	90
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	93
A. Proses Pengolahan Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jeneberang .....	93
B. Tantangan dan Kelemahan Proses Tambang Tradisional di Sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa .....	108
1. Tantangan Tambang Tradisional Di Sungai Jeneberang.	109
2. Kelemahan Tambang Tradisional Di Sungai Jeneberan.	111
C. Upaya Penambang Tradisional dapat Bertahan dari Pola Penambangan Moderen .....	115
BAB VI KESIMPULAN .....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk pada suatu kawasan mendorong peningkatan kebutuhan pokok yang turut berdampak pada eksploitasi sumberdaya alam. Eksploitasi ini mendorong tumbuhnya industri pertambangan Indonesia secara moderen maupun pertambangan tradisional. Dua jenis pertambangan ini sangat terkait dengan berbagai pihak, baik pemilik modal maupun masyarakat lokal biasa yang mencari pencaharian hidup. Eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran dapat memberikan dampak serius bagi kerusakan ekologi lingkungan lingkaran pertambangan.

Dinamika eksploitatif pertambangan tersebut secara mendasar mendapatkan pengawasan pemerintah. Pengawasan penambangan membutuhkan komitmen yang kuat untuk menindak secara tegas para penambang yang telah melanggar peraturan dan perijinan. Namun, komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sudah tinggi, tetapi belum optimal.

Salah satu prospek pengawasan penambangan dapat dilihat pada berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan

untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut, seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat kabupaten/kota dalam pengawasan penambangan. Namun, sangat disayangkan pemerintah kabupaten/kota belum memaksimalkan kekuatan hukum ini dalam penegakan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Permasalahan lingkungan tetap saja akan terjadi di lingkungan pertambangan. Hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi. Misalnya, penggalian tambang menggunakan alat berat dengan kapasitas garukan permukaan yang berlebihan akan merusak hilir sungai.

Meskipun demikian, di sisi lain kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi kabupaten/kota bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan.

Keuntungan ekonomi tersebutlah yang mendorong masyarakat melakukan penambangan pasir di sungai Jeneberang Kecamatan Somba

Opu, Kabupaten Gowa. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa penambangan pasir di sungai tersebut dilakukan oleh Sejumlah warga sebagai mata pencaharian utama. Perkembangan kawasan perkotaan mendorong laju peningkatan kebutuhan, apalagi di tengah minimnya lapangan pekerjaan semakin menjadi motivasi utama masyarakat melakukan penambang pasir menjadikannya profesi utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Pertambangan bahan galian dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu: 1) golongan A, yaitu bahan galian strategis; 2) golongan B, yaitu bahan galian vital; dan 3) golongan C, yaitu merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan bahan galian vital.

Bahan penambangan yang diolah merupakan tipe tipe bahan tambang golongan C yaitu pasir. Pertambangan golongan C merupakan jenis bahan galian jenis batu, krikil, dan pasir. Sebelumnya bahan galian ini tidak diperhitungkan karena harganya yang rendah. Namun, saat ini sangat diperhitungkan karena tingginya permintaan. Umumnya bahan galian C ini digunakan sebagai bahan dasar pembangunan infrastruktur rumah pribadi, swasta maupun perkantoran pemerintah. Laju permintaan ini dipicu oleh penyediaan sarana pemukiman untuk mengakomodasi laju pertumbuhan penduduk utamanya di perkotaan yang menyebabkan penambangan bahan galian C dilakukan pada berbagai kawasan.

Masyarakat penambang memanfaatkan timbunan pasir yang terbawah dari arah gunung. Pertemuan arus sungai dan arus pasang laut membentuk pola gundukan pasir di dasar sungai Jeneberang. Masyarakat penambang mengidentifikasi posisi gundukan pasir dengan tongkat bambu, hal ini dilakukan secara turun-temurun karena kondisi air sungai yang keruh tidak memungkinkan posisi tumpukan pasir dapat terlihat. Teknik pengangkutan pasir dari dasar sungai menggunakan timba berisi kurang lebih lima puluh kilo satu kali penggerukan dari dasar sungai. Pasir yang dikeruk menggunakan perahu sampan yang kemudian ditampung di lokasi penimbunan. Aktifitas penambangan pasiri tradisional ini menimbun pasir di sisi jembatan penyeberangan perahu Makassar-Taeng.

Aktivitas penambangan pasir dapat memberikan berbagai dampak ekologi lingkungan sungai. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis posisi penambangan yang dilakukan di dasar sungai Jeneberang secara tradisional justru memberikan dampak positif yaitu kedalaman sungai tetap stabil menampung debit air. Poses semacam ini akan memberikan keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan.

Halim (2004) mengemukakan bahwa bahan galian golongan C yang meliputi pasir, tanah liat, garam batu, mika, tawas, batu permata, pasir kwarsa, batu apung, marmer, batu kapur, dan andesit sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun golongan B, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan berizin maupun yang tidak berizin berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Banyak dampak lingkungan yang timbul diakibatkan oleh sebab yang beraneka ragam. Pertambangan yang dilakukan dapat merusak permukaan tanah. Jika dilakukan di sungai akan merusak bebatuan dan kualitas air sehingga dapat mengubah pola keseimbangan ekosistem yang ada di dalam air. Pada kasus pertambangan di sungai Jeneberang, proses penggerukan pasir dilakukan dengan cara yang sangat tradisional. Beberapa keterangan pada observasi awal yang penulis lakukan menunjukkan kecenderungan penambang yang berupaya menjaga kelestarian setiap sisi sungai sehingga mereka melakukan penambangan pasir di tengah sungai.

Informasi yang penulis dapatkan pada observasi awal penelitian harus ditindak lanjuti dengan beberapa pertimbangan penting; *pertama*, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola penambangan galian C yang dilakukan penambang di tengah sungai Jeneberang. *Kedua*, bagaimana perizinan aktivitas pertambangan tersebut untuk mengetahui legalitas aktivitas penambangan. *Ketiga*, analisis keselamatan masyarakat yang melakukan penambangan pasir. *Keempat*, pengkajian terhadap kapasitas angkutan pasir dalam satu hari dan bagaimana distribusi penjualannya. *Kelima*, bagaimana relasi masyarakat penambang dengan lingkungan di areal penambangan pasir sungai Jeneberang.

Substansi fundamental dari beberapa pertimbangan tersebut merupakan pembacaan relasi antara manusia dengan lingkungan hidup.

Arah kajian pertambangan rakyat, khususnya galian C, yang berelasi dengan keseimbangan lingkungan penting dilakukan. Proses relasi antara manusia dan lingkungan tersebut dapat dikaji menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan ini mencoba memahami masyarakat pada suatu kawasan yang mencakup seluruh aspek perilaku sosial, ekonomi maupun budayanya.

Eksistensi aktivitas tambang rakyat di aliran sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa harus diteliti lebih jauh sebagai upaya riset pemetaan masalah sehingga hasil risetnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah mendesain kebijakan jangka panjang berkaitan dengan pertambangan tradisional yang lebih pro pada ekologi lingkungan dan manusia. Selain itu, penelitian ini juga penting dilakukan untuk mengedukasi masyarakat penambang tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup sebagai ruang penting ruang hidup anak cucu mereka di masa depan yang bebas dari bahaya lingkungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, "Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Kajian Antropologi)"

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah Sebagai Berikut :

1. Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang rakyat tradisional
2. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan tambang rakyat tradisional
3. Tantangan tambang rakyat tradisional di aliran sungai jeneberang
4. Kelemahan tambang rakyat tradisional di aliran sungai jeneberang
5. Upaya penambang rakyat tradisional dapat bertahan dari tambang modern

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu peneliti sehingga peneliti ini hanya berfokus pada tiga titik fokus penelitian yaitu sebaga berikut :

1. Proses pengolahan tambang rakyat tradisional di aliran sungai jenberang
2. Tantangan dan kelemahan proses tambang tradisional di aliran sungai jeneberang

3. Upaya penambang tradisional dapat bertahan dari pola penambangan modern

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

- A. Bagaimanakah proses pengolahan tambang rakyat di aliran sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?
- B. Bagaimana upaya penambang tradisional dapat bertahan dari pola penambangan moderen?
- C. Apa saja tantangan dan kelemahan proses tambang tradisional di sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian**

Penelitian memiliki tujuan dan kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Lebih spesifik tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini diuraikan, sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui proses pengolahan tambang rakyat di Aliran Sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

- b. Untuk mengetahui tantangan dan kelemahan proses tambang tradisional di sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mengetahui upaya penambang tradisional dapat bertahan dari pola penambangan moderen.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut.

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca mengenai tambang rakyat tradisional dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti yang lain.
- 2) Menambah wawasan tentang tambang rakyat tradisional di sungai Jeneberang Kabupaten Gowa.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan edukasi masyarakat tentang tambang rakyat tradisional, khususnya di sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pengambil kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa berkaitan dengan eksistensi tambang rakyat tradisional di sungai Jeneberang Kabupaten Gowa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tambang rakyat tradisional sebagai objek kajian kiranya telah menarik perhatian banyak penulis. Terbukti dengan lahirnya beberapa tulisan atau tesis sebelumnya yang membahas Pertambangan sebagai objek kajiannya. Hal itu dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Retno Purwandari (2019), dalam penelitiannya membahas tentang *"Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Golongan C Tanpa Dilengkapi Izin Pertambangan Rakyat (Study Kasus Kecamatan Kasima Kabupaten Bojonegoro)"*. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui alasan mengapa pelaku usaha Pertambangan Rakyat melakukan penambangan bahan galian golongan C tanpa izin (Illegal), bentuk dari upaya Pemerintah Daerah setempat dalam menanggulangi masalah pertambangan rakyat yang belum memiliki izin usaha pertambangan Kecamatan Kaiman, Kabupaten Bojonegoro. Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan alasan yang mendasari masih marak terjadi kegiatan pertambangan rakyat bahan galian golongan C tanpa izin (illegal) yang terjadi berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor pemerintah, faktor masyarakat dan faktor penegakan hukum.

Amelia Niode (2013), dalam jurnal Penelitiannya membahas tentang “Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang terjadi antara lain adalah terjadinya pencemaran udara oleh debu, hilangnya sebagian lapisan tanah, hilangnya tanaman-tanaman penutup tanah, beresiko terjadinya longsor, hilangnya sebagian pemandangan yang indah dan sejuk, rusaknya jalan desa. Dampak yang ditimbulkan harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak yang terkait diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak penambang dan masyarakat sekitar penambangan.

Inarni Nur Dyahwanti (2007), dalam penelitian ini membahas tentang “Kajian dampak Lingkungan kegiatan Penambang Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung”. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang dampak lingkungan yang terjadi antara lain adalah adanya lahan yang rawan longsor, sedimentasi pasir di sungai, potensi terjadinya banjir di daerah bawah, hilangnya bahan organik tanah, hilangnya lapisan tanah, perubahan struktur tanah, polusi udara berupa debu, dan rusaknya jalan desa. Sedangkan dampak social ekonomi penambang dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Dampak positif sosial ekonomi yang terjadi antara lain peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan angka pengangguran.
2. Dampak negatif sosial ekonomi antara lain adanya kecelakaan saat bekerja, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan, ketakutan, kekawatiran banjir dan longsor.

Agus Beni Heriawan, dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Penambangan Galian C di Daerah Aliran Sungai Bentek terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara.”

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya penambangan bahan galian C berupa pasir dan batu yang tersebar di daerah aliran sungai berdampak pada lingkungan sekitar. Sehingga hal ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui aktivitas galian C di daerah aliran Sungai Bentek dan dampak galian C di daerah aliran Sungai Bentek terhadap lahan pertanian Dusun Bentek Kabupaten Lombok Utara. Rancangan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Dusun Bentek baik yang terlibat langsung dalam penambangan pasir maupun yang terkena dampak penambangan pasir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, sedangkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil

penelitian membuktikan bahwa aktivitas galian C di sungai Bentek berdampak pada kerusakan lahan pertanian Dusun Bentek. Aktivitas galian C yang terjadi merupakan jenis penambangan ilegal, karena penambang tidak memiliki izin penambangan rakyat yang sah. Kurangnya perhatian dari pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat mengakibatkan masyarakat menambang melakukan dengan penuh kebebasan sehingga dapat merusak lahan pertanian, sebab lokasi penambangannya sangat dekat dengan lahan pertanian sehingga terjadinya erosi tanah dan banjir. Kerusakan lahan pertanian ini telah mempengaruhi pendapatan para petani. Oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat setempat untuk memperhatikan dan menjaga lingkungan tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bambang Yuniarto dan Ridwan Saleh (2011) dengan judul, "Persoalan Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan pertambangan rakyat yang sebagian besar dilakukan tanpa izin (PETI) atas segala jenis bahan galian semakin marak di pelosok tanah air. Secara implisit pertambangan rakyat telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang ditindaklanjuti dengan 4 PP sebagai pedoman, kriteria dan penetapan WPR yang diatur dalam perda pertambangan. Sesuai pasal 20 hingga 21 UU tersebut, kewenangan pengelolaan pertambangan rakyat secara penuh telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Penanganan PETI yang saat ini marak beroperasi di beberapa daerah dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan pasal 24 yang tidak membatasi masa operasinya, justru bila PETI sudah beroperasi harus diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Dalam penanganan pertambangan rakyat perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat petambang dengan memerhatikan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan, permodalan, teknologi dan lingkungan serta pemasaran hasil tambang. Pasca pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009, peran daerah menjadi sentral dalam pengelolaan pertambangan rakyat. Perusahaan pertambangan, BUMN, BUMD dan LSM dapat mengambil bagian dalam ikut mengembangkan pertambangan rakyat di daerahnya.

Penelitian dengan fokus tambang galian C juga dilakukan oleh Dwiyana Achmad Hartanto dan Suyoto (2017) dengan judul, "Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati." Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus penambangan galian C ilegal di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati, berupa penegakan hukum yang bersifat penal untuk sarana pemidanaan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sedangkan sarana non penal dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, yang bertujuan sebagai upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.

Laila Azkia (2018) melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Sosiologi Ekonomi pada Tambang Rakyat (Kajian Terhadap Kegiatan Ekonomi Dalam Tambang Rakyat Intan di Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan)” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tambang rakyat intan di Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan merupakan jenis sektor ekonomi informal. Aktifitas ekonomi di dalamnya diketahui pemerintah, namun dibiarkan. Sebagai sektor ekonomi harusnya tambang rakyat menjadi penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat yang berprofesi sebagai pendulang. Namun, yang terjadi justru pihak-pihak luar yang bukan berprofesi sebagai pendulang atau pemilik tanah atau pemilik mesin yang mendapat keuntungan yang besar dari aktifitas ekonomi sektor informal dalam tambang rakyat. Mereka yang memperoleh keuntungan tersebut kebanyakan adalah para pembonceng gratis atau yang disebut Granovetter dengan istilah *free rider*. *Free Rider* adalah mereka yang sebenarnya tidak memiliki modal dalam aktifitas pertambangan tetapi mengambil keuntungan dari adanya pertambangan tersebut. *Free Rider* dalam tambang rakyat akan terus meningkat seiring dengan tidak adanya peran pemerintah dalam mengatur atau membina aktivitas ekonomi yang melingkupi tambang rakyat itu sendiri. Sektor informal menjadi lahan subur bagi peningkatan jumlah dan peran *free rider*. Penelitian ini berfokus pada aktivitas tambang tradisional di aliran sungai jeneberang sehingga memberikan kebaruan pada penelitian-penelitian tentang tambang rakyat yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dari beberapa penelitian yang relevan di tinjau dari segi tema, tulisan ini tidak jauh dari karya-karya terdahulu semuanya membahas tentang aktivitas penambang Pasir. Penelitian tersebut memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tambang Pasir atau tambang golongan C. Akan tetapi, penulis memilih tambang pasir dengan melihat bagaimana Proses Aktivitas tambang rakyatn tradisional, tantangan tambang rakyat tradisional dan bagaimana upaya penambang tradisional bertahan dari aktivitas penambang modern. Perbedaan itulah mencerminkan nilai-nilai budaya yang berbeda atau paling tidak tataran nilai yang berbeda. Kebaharuan dari penelitian ini juga dilihat dari paradigma yang digunakan yaitu paradigma ekologi budaya yang tidak menjadi teori dari penelitian relevan yang dikemukakan sebelumnya.

## **B. Tinjauan Konseptual**

### **1. Hakikat Pertambangan**

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang banyak digarap di Indonesia. Noor (2006: 14) mengemukakan bahwa industri pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang

tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia.

Salim (2007: 89) mengemukakan bahwa usaha pertambangan terdiri atas usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan penjualan, yaitu:

- a) Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda- tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- b) Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
- c) Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- d) Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.

- e) Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- f) Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.

Pertambangan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Noor (2006: 67) mengemukakan bahwa sumberdaya mineral adalah sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Adapun jenis dan manfaat sumberdaya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pertambangan sejatinya merupakan pengelolaan sektor sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta

keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

## **2. Asas-Asa Pertambangan**

Asas-asas pertambangan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu;

### **a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan**

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

### **b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara**

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

### 3. Jenis-Jenis Pertambangan

Departemen Pertambangan dan Energi (Reksohadiprodo, 1993: 142), menggolongkan mineral ke dalam tiga kelompok yaitu:

*Pertama*, Golongan A merupakan bahan galian strategis, yang dimaksud strategis adalah bahan tambang yang memiliki kegunaan untuk menunjang perekonomian negara serta pertahanan keamanan negara.

*Kedua*, Golongan B merupakan bahan galian vital yang digunakan untuk menjamin hajat hidup orang banyak, seperti besi, tembaga, emas dan perak.

*Ketiga*, Golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian strategis dan vital, contohnya marmer, batu kapur, pasir, tanah liat.

Ngadiran *et al* (2002: 120) mengemukakan bahwa izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti bahan galian tambang golongan A, golongan B, maupun golongan C. Ada banyak jenis sumberdaya alam bahan tambang yang terdapat di bumi Indonesia. Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas: minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah);

- b. Bahan galian vital golongan B, terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkom); dan
- c. Bahan galian golongan C, terdiri atas; pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya mineral digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: bahan galian vital, bahan galian strategis, dan bahan galian industri. Bahan galian golongan A termasuk bahan galian vital. Bahan galian B termasuk jenis bahan galian strategis, sedangkan bahan galian golongan C merupakan jenis bahan galian industri.

#### **4. Pertambangan Pasir**

Penambangan pasir dapat dilakukan berdasarkan sebaran sumber daya material pasir. Hal ini dilakukan berdasarkan pengukuran ketersediaan sumber daya alam yang terkandung dalam kapasitas daya dukung lingkungan tertentu karena sumber daya alam tidak tersebar

secara merata sehingga kandungan sumber daya material pasir juga berbeda-beda pada setiap daerah.

Handoyo (Harlan, 2011: 13) mengemukakan bahwa penambangan pasir dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun cara mekanis. Penambangan pasir dengan alat mekanis menggunakan peralatan *backhoe*, *excavator*, *loader* dan *buldozer*. Penambangan secara mekanis dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Pengupasan adalah kegiatan memindahkan lapisan tanah penutup dengan menggunakan alat berat *backhoe* atau *excavator*.
- b. Penggalan berupa kegiatan menggali pasir dan mengambil pasir dari sumbernya, setelah digali pasir lalu dikumpulkan di lokasi yang aman.
- c. Pemuatan, setelah proses penggalan, pasir dimuat atau diangkat lalu dipindahkan ke dalam truk.
- d. Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan bahan galian pasir dari tempat penggalan ketempat penimbunan atau langsung kepada konsumen dengan menggunakan truk.

Dadan (2011) mengemukakan cara penambangan konvensional dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana diantaranya linggis, cangkul, dan sekop. Cara penambangan tradisional memiliki tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, proses ini diawali dengan pengangkutan berbagai peralatan tambang, dan selanjutnya adalah pembuatan atau pembukaan jalan untuk proses pengangkutan.
- b. Tahap eksploitasi atau penggalian, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini utamanya berupa penambangan atau penggalian pasir.
- c. Tahap pengangkutan, Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah ketika alat-alat berat mulai masuk ke lokasi penambangan untuk mengangkut pasir.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun mekanis menggunakan peralatan berat. Masyarakat umum biasanya melakukan penambangan pasir dengan menggunakan cara-cara konvensional yang masih sangat tradisional. Selain itu, penambangan menggunakan cara mekanis alat berat banyak digunakan oleh perusahaan galian C untuk menggenjot produksi.

Proses penambangan sumber daya di Indonesia diatur dalam regulasi sistem pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sumardjono, dkk (2011: 35) mengemukakan bahwa rezim merupakan kelembagaan sosial yang mengatur aksi-aksi terlibat di dalam aktivitas atau sekelompok aktivitas tertentu. Pengelolaan SDA dapat ditelaah dalam beberapa rezim pengaturan berdasarkan *property* sendiri merupakan hasil klaim sah terhadap suatu sumber daya atau jasa. Jika

suatu sumber daya tidak memiliki suatu klaim tertentu terhadapnya maka sumber daya tersebut bukan *property* atau bebas diakses oleh siapapun. *Property* dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu: (1) *state property* dimana klaim sah dimiliki oleh pemerintah; (2) *private property* dimana klaim sah dimiliki oleh individu atau korporasi; dan (3) *common property* dimana sekumpulan individu membentuk suatu kelompok dan memiliki klaim sah terhadap suatu sumber daya.

Selain jenis properti penambangan tersebut, terdapat pula kawasan penambangan yang lazimnya disebut tambang rakyat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pertambangan Rakyat pasal 22 bahwa kawasan pertambangan rakyat disebut dengan wilayah pertambangan rakyat (WPR). WPR adalah salah satu bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kriteria untuk bisa ditetapkan sebagai WPR antara lain: (1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau di antara tepid an tepi sungai; (2) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan penambangan rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun; dan (3) Luas maksimal WPR sebesar 25 hektar.

Aktivitas pertambangan pasir merupakan kerja fisik pembongkaran sumber daya alam secara terbuka. Hal ini tentunya berkaitan dengan penggerusan permukaan kawasan tertentu yang mengakibatkan banyak kerusakan. Dengan demikian, aktivitas penambangan pasir dapat memberikan dampak secara sosial dalam bentuk iteraksi sosial antara

penambang. Soerjono (2009) mengemukakan interaksi sosial dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif merupakan bentuk interaksi social yang menguatkan ikatan sosial, jadi bersifat mendekatkan atau positif yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi (hubungan atau gabungan) seperti:

- a. Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan.
- c. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran.
- d. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur- unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur- unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.

Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, merupakan bentuk interaksi yang merusak ikatan sosial, bersifat menjauhkan atau negatif dan yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik, sebagai berikut.

- a. Persaingan adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok social tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik dipihak lawannya.
- b. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur - unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.
- c. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut.

Fatimah (2013: 3-5) mengemukakan dampak sosial tersebut, sebagai berikut.

- a. Interaksi penambang pasir berupa kerjasama, bentuk kerjasama dengan patner kerja yaitu memberi pinjaman uang dan kerjasama dalam proses penjualan pasir.
- b. Kerjasama dalam pemberian informasi, adapun bentuk kerjasama dalam pemberian informasi yaitu informasi tentang konsumen atau pembeli pasir dan supir truk memberikan informasi kepada penambang tentang kebutuhan konsumen akan pasir.
- c. Kerjasama dalam pembagian tugas, adapun bentuk kerjasama pembagian tugas adalah pembagian kerja berdasarkan usia dan pembagian kerja berdasarkan modal awal bekerja.
- d. Persaingan merupakan pendorong manusia untuk melakukan aksi yang bersifat kompetitif. Bentuk-bentuk persaingan antar penambang pasir yaitu persaingan dalam memberi potongan harga kepada konsumen, bersaing dalam memberikan pasir yang berkualitas dan bersaing dalam hal mencari konsumen.
- e. Pertentangan atau konflik yang sering terjadi antar penambang pasir disebabkan oleh perebutan lahan tambang pasir dan mengambil lahan tanpa ijin.
- f. Akomodasi yang dapat digunakan sebagai mediator untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Selain dampak sosial tersebut di atas, hal ini juga dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Murtolo, dkk (1995: 87) mengemukakan terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah dampak yang memberikan keuntungan bagi lingkungan sekitar, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang memberikan kerugian bagi lingkungan.

Kusumawati dan Utama (2012: 4) mengemukakan bila dilihat dari sudut pandang ekonomi penambangan mempengaruhi perubahan ekonomi masyarakat yaitu *pertama*, kegiatan penambangan mampu meningkatkan pendapatan penambang. *Kedua*, dilihat dari terpenuhinya kebutuhan keluarga baik kebutuhan fisiologis, keamanan dan sosial.

Penambangan pasir juga memberikan dampak terhadap budaya masyarakat. Dampak ini dapat dilihat pada aspek peralihan sistem kerja masyarakat yang dahulu berprofesi sebagai petani beralih menjadi penambang pasir. Kecenderungan semacam ini dapat ditemukan pada setiap lokasi penambangan pasir karena motif ekonomi yang dianggap lebih menguntungkan. Di sisi lain, lahan pertanian memang telah dikonversi menjadi lahan pertambangan pasir.

Rissamasu (2012) mengemukakan bahwa aktivitas pertambangan juga dapat ditinjau dari aspek sebagai berikut.

a. Aspek fisik

Aspek fisik merupakan dampak yang langsung terlihat. Adanya kegiatan pembukaan lahan akan menghilangkan tanaman atau pohon-pohon atau cover crop. Hilangnya tanaman atau pohon-pohon tersebut sebagai penutup tanah akan mengakibatkan perubahan pada struktur tanah, yang mengakibatkan tanah rawan terkikis, baik kikisan oleh angin maupun air. Hilangnya tanaman tumbuhan pada area tersebut, akan mengakibatkan perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, menyebabkan terjadinya erosi oleh air permukaan serta mengakibatkan penurunan kualitas tanah.

b. Aspek kimia

Aspek kimia, merupakan penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan yang melampaui batas yang telah ditetapkan. Dampak kimia juga dapat disebabkan dari adanya kegiatan penunjang disekitar kawasan pertambangan, misalkan kegiatan perbengkelan, warung makan, dan kegiatan lainnya.

c. Aspek biologi

Berkurangnya tanaman yang merupakan dampak dari aspek fisik, juga mengakibatkan dampak pada aspek biologi, yaitu berkurangnya spesies flora dan fauna pada kawasan tertentu. Beberapa spesies flora

dan fauna sangat rentan dan sensitif terhadap adanya perubahan pada lingkungannya, sehingga meskipun ada rekayasa lingkungan untuk penyelamatan spesies tersebut akan sulit berhasil.

d. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya

Adanya kegiatan pertambangan pada suatu kawasan merupakan kegiatan yang padat teknologi dan padat modal. Kegiatan ekonomi saat berlangsungnya proyek akan memberikan peluang usaha yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor yang terkait. Lapangan pekerjaan akan tersedia bagi masyarakat sekitar, meskipun terdapat juga kompetisi dengan masyarakat pendatang. Masuknya ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek, akan berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar.

e. Aspek kesehatan dan keamanan

Adanya beragam pola hidup hingga perbedaan status sosial dalam masyarakat, serta adanya kegiatan tambang yang berpotensi memberikan perubahan pada lingkungan, mengakibatkan munculnya beberapa jenis penyakit pada masyarakat setempat. Berubahnya kehidupan sosial, menyebabkan timbulnya masalah akibat adanya perbedaan yang sulit diterima oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut membuat rawan keaamanan yang dapat mengganggu proses tambang itu sendiri.

#### f. Reklamasi tambang

Reklamasi merupakan upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi serta daya lingkungan terhadap lahan bekas tambang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perencanaan tambang yang baik dan benar, sejak awal akan mencantumkan upaya reklamasi lahan setelah tambang selesai beroperasi, atau bahkan pada saat kegiatan tambang tersebut berlangsung.

### **C. Tinjauan Teoritis**

Tinjauan teoritis merupakan teori yang relevan digunakan dalam menjelaskan variable yang di teliti dan sebagai dasar untuk jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini. Teori yang di gunakan bukan sekedar pendapat dari para ahli, tetapi teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya berikut teori-teori yang di gunakan dalam menganalisis atau memecahkan permasalahan dalam penelitian ini :

#### **1. Teori Determinisme dan Posibilisme**

Determinisme, “muncul pada akhir abad 19 dan awal-awal abad 20 dari penganut gagasan-gagasan Darwin, penalaran deduktif dan hubungan sebab akibat linear yang sederhana. Pendekatan ini nampaknya juga menghasilkan cara untuk mengolah dan menginterpretasi data mengenai keanekaragaman manusia yang waktu itu semakin bertambah banyak dan membanjiri kalangan ilmiah Eropa. Pendekatan ini berasumsi bahwa lingkungan fisik (alam) adalah

pendorong utama dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain perkembangan pola kehidupan suatu masyarakat dalam bentuk kebudayaan dipandang sebagai pengaruh yang dimunculkan oleh lingkungan alamnya. Pendekatan ini dalam bentuk paling murni dan paling negatif dianut dan disebarluaskan oleh ahli geografi Huntington dan Carlson, yang mencoba memperlihatkan bagaimana pengaruh dominan iklim dan cuaca pada sejarah umat manusia (*Arifin. 1998*).

Determinisme ini disebut juga dengan determinisme lingkungan, atau kadang-kadang juga disebut environmentalism, yang sebenarnya sudah jauh sebelum Darwin perspektif ini sudah ada, bahkan menjadi sebuah aliran pemikiran. “Menurut Vayda dan Rappaport menyatakan bahwa tokoh-tokoh klasik seperti Hippocrates, Plato, Polybius, Plotemy, Bodin, Montesqieu, Ratzel, Huntington, Davis, Semple dan Mason adalah beberapa nama besar yang dikaitkan sebagai pengikut aliran ini. Mereka percaya bahwa kemanusiaan dan budaya ditentukan oleh bentuk-bentuk lingkungan alam, dan bahwa fenomena kebudayaan dapat dijelaskan dan seharusnya diramalkan, sebagian besar, dengan cara mengacakannya kepada lingkungan alam dimana kebudayaan itu hidup.

Dalam hal ini faktor geografis menjadi penentu dari kebudayaan manusia. Menurut Semple, faktor geografi memberi efek mendasar dari kebudayaan manusia. Huntington juga memegang prinsip yang sama, bahwa ras dan lingkungan geografis menentukan kehidupan manusia. Menurutnya iklim sebagai unsur paling mendasar dari lingkungan geografis

menentukan baik kemunculan maupun kehancuran peradaban, melalui dampak langsungnya terhadap kesehatan dan kegiatan manusia, dan melalui dampak tidak langsung dalam bentuk makanan, penyakit dan cara kehidupan.

Dengan paradigma ini kemunculan peradaban Hindius, peradaban lembah sungai Nil, *Mesopotamia*, atau Lembah sungai *Hwang Ho*, menjadi contoh ekstrim untuk menunjukkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya peradaban-peradaban kuno tersebut. Umumnya peradaban kuno tersebut berada di lembah sungai besar yang memberi kesuburan dan memicu kemajuan dan pertumbuhan penduduk.

Di masa lalu, studi tentang kebudayaan selalu ditekankan akan adanya keterkaitan perilaku manusia dengan lingkungannya atau *environmental, determinism*. Pendekatan tersebut yang juga dikenal dengan geographical determinism atau ethnographical environmentalism, lebih mendasarkan pada suatu pandangan bahwa kondisi suatu lingkungan amat berperan dalam membentuk kebudayaan suatu sukubangsa, antara lain tampak pada pendapat dari Elsworth Huntington yang percaya bahwa ada saling mempengaruhi antara kondisi iklim dengan kebudayaan (Poerwanto, 2006:80).

*Posibilisme*, merupakan “reaksi terhadap determinisme yang mulai membuat kaum antropologi ekologi mencoba menemukan solusi pendekatan baru yang dalam mengkaji masalah hubungan manusia

dengan lingkungan. *Posibilisme* memandang bahwa walaupun lingkungan mungkin mempengaruhi pola-pola kebudayaan dengan menghadirkan berbagai kendala, tetapi lingkungan sendiri tidak bisa menciptakan fenomena-fenomena sosio-kultural. "Lingkungan alam tidaklah sederhana begitu saja memaksakan diri mereka terhadap manusia dan perilakunya, tetapi memberi manusia dengan beberapa pilihan dan kemungkinan. Jadi karena itu efek dari lingkungan alam lebih bersifat "membatasi" daripada "menentukan," dan pembatasan ini bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain dan antara satu masa dengan masa yang lain. Kaum posibilism berpendapat bahwa pada hakikatnya perilaku di dalam suatu kebudayaan dipilih secara selektif, atau jika tidak, secara tak terduga merupakan hasil adaptasi makhluk manusia itu sendiri. Suatu lingkungan tertentu tidak dapat dipandang sebagai sebab utama yang menyebabkan perbedaan suatu kebudayaan, melainkan hanya sebagai pembatas atau penyeleksi. Mereka beranggapan bahwa pada dasarnya faktor geografis tidak dapat membentuk suatu kebudayaan manusia, dan pembentukan suatu kebudayaan lebih merupakan suatu gejala yang sepenuhnya bersifat historis bahkan superorganik. Dengan kata lain, keadaan alam lingkungan tidak sepenuhnya merangsang timbulnya suatu pola kebudayaan tertentu (Poerwanto, 2006:81).

Para pengikut posibilisme menekankan pentingnya gagasan tentang kesatuan terestrial (kesatuan kehidupan di permukaan bumi) dalam hubungan antara kehidupan manusia dengan lingkungan alamnya.

Bumi harus dilihat sebagai “keseluruhan” yang terdiri atas bagian-bagian yang terkoordinasi, dan manusia muncul sebagai salah satu agen yang paling berkuasa di dalam merubah permukaan teresterial. Karena itu, kajian ekologis harus dimulai dengan pengaruh manusia dan perilaku mereka atas lingkungan alamnya, bukan dengan efek dari lingkungan alam terhadap budaya. Penganut posibilisme mengesankan bahwa kajian-kajian komparatif tentang kebudayaan yang berbeda yang mendiami suatu lingkungan tertentu membuktikan bahwa pola-pola sosiokultural yang sama juga muncul pada keadaan lingkungan yang berbeda (Arifin.1998). Atau sebaliknya, masyarakat yang menempati wilayah dengan pola-pola lingkungan alam fisik yang relatif sama justru memiliki kondisi kebudayaan yang berbeda. Sebagai contoh, Indonesia yang rata-rata memiliki iklim alam tropis di sekitar daerah katulistiwa justru memiliki banyak sukubangsa dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Ini artinya kondisi lingkungan alam fisik tidak semata-mata menjadi penentu kebudayaan masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut.

Sebenarnya, orang-orang determinisme lingkungan tidaklah sama sekali menafikan peranan faktor-faktor non-lingkungan. Huntington, misalnya, meskipun menempatkan iklim sebagai faktor utama, namun dia mengakui adanya saling pengaruh antara lingkungan biologis dan fisikal dengan faktor-faktor kebudayaan. Sebaliknya, orang-orang posibilisme tidak seluruhnya menolak efek dari lingkungan terhadap kehidupan manusia. Bagi mereka, manusia tidak dapat membebaskan diri seluruhnya

dari kondisi unsur-unsur alam, meskipun manusia itu mampu mengembangkan piranti dan keterampilan teknis yang tinggi.

Oleh karena itu, Julian H. Steward mempelopori Cultural Ecology atau ekologi budaya, mengambil posisi tengah antara aliran determinisme dan posibilisme. Steward menolak argumen yang mengatakan bahwa budaya dibentuk oleh lingkungan alam, namun dia juga tidak menempatkan faktor lingkungan pada peranan yang pasif. Steward mendefinisikan lingkungan sebagai “the total web of life wherein all plant and animal species interact with one another and with physical features in a particular unit of territory,” kemudian dia memisahkan manusia dari budaya dalam hubungan mereka dengan lingkungan. Dalam berhubungan dengan organisme lain, manusia tidaklah sekedar bertindak sebagai salah satu organism dalam pengertian fisik, tetapi mereka juga memperkenalkan faktor super organik dari budaya, yang dipengaruhi dan mempengaruhi keseluruhan jaringan kehidupan. Sebagian dari unsur-unsur budaya berasal dari hubungan antara manusia dengan lingkungan, tetapi sebagian unsur lain berasal dari proses historikal. Perbedaan ini penting dalam metode, konsep, dan masalah kajian-kajian ekologis.

Tujuan umum ekologi budaya dari Julian Steward adalah “untuk menjelaskan asal-usul, ciri-ciri dan pola-pola tertentu yang tampak di berbagai daerah yang berlainan. Lebih khusus lagi, cabang antropologi ini berusaha untuk menjelaskan apakah penyesuaian diri berbagai masyarakat manusia pada lingkungannya memerlukan bentuk-bentuk

perilaku tertentu ataukah penyesuaian diri tersebut bersifat luwes, artinya masih memberikan ruang dan kemungkinan pada berbagai pola perilaku lain yang mungkin diwujudkan. Steward yakin bahwa tujuan ini dapat tercapai dengan mempelajari relasi antara kebudayaan dan lingkungannya dalam kurun waktu tertentu. Ada tiga langkah dasar yang perlu diikuti dalam studi ekologi budaya ini, yakni :

1. melakukan analisis atas hubungan antara lingkungan dan teknologi pemanfaatan dan produksi;
2. melakukan analisis atas “pola-pola perilaku dalam eksploitasi suatu kawasan tertentu yang menggunakan teknologi tertentu” dan
3. melakukan analisis pada “tingkat pengaruh dari pola-pola perilaku dalam pemanfaatan lingkungan terhadap aspek-aspek lain dari kebudayaan (Ahimsa-Putra, 1994:4)

Berdasarkan penjelasan diatas, teori determinisme dan posibilisme memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat ekologi budaya , determinisme melihat bahwa kondisi suatu lingkungan sangat berperan dalam membentuk kebudayaan suatu suku bangsa. Sedangkan posibilisme memandang bahwa lingkungan sendiri tidak bisa menciptakan fenomena-fenomena sosial-kultural. Kaitannya dengan penelitian tambang rakyat tradisonal di aliran sungai Jenebrang melihat bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam pasir dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## **2. Paradigma Ekologi pada Tambang Rakyat Tradisional**

Penelitian “Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jeneberang” menggunakan tiga paradigme ekologis, yakni; a) Paradigma ekologi budaya, b) paradigma ekologi lingkungan, dan, c) paradigma ekologi pembangunan.

### **a. Paradigma Ekologi Budaya**

Dalam ekologi dikenal istilah ekologi budaya. Ekologi budaya sendiri erat kaitannya antropologi, maka sering juga disebut sebagai antropologi ekologis. Hadirnya konsep ekologi budaya ini merupakan wujud ketidakpuasan para ahli terhadap konsep determinasi dan kementakan lingkungan. Menurut Steward (1955) dalam Abdoellah (2017), interaksi kebudayaan dan lingkungan berlangsung melalui proses adaptasi, terutama inovasi teknologi. Interaksi ini tidak hanya mengubah lingkungan, tetapi juga mengubah asupan energi, materi, dan informasi ke dalam populasi manusia, sehingga kebudayaan menjadi cara hidupnya turut berubah. Di sini terlihat bahwa Steward menganggap kebudayaan merupakan suatu tumpuan di mana manusia bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan beserta perubahannya.

Steward (Febrianto, 2016) menjelaskan secara eksplisit hubungan antara lingkungan dengan kebudayaan ini di dalam bukunya *The Economic and Social Primitive Bands*. Dalam buku ini Steward menguraikan, mendefenisikan, serta mengembangkan apa yang dia sebut

sebagai “ekologi budaya” (*cultural ecology*). Perspektif ini, menurutnya adalah “*differs from the relativistic and neo- evolutions 7 conceptions of cultural history, in that it introduces the local environment as the extra cultural factor in the fruitless assumption that culture comes from culture*”. Namun, lingkungan lokal itu sendiri bagi Steward (1936) bukanlah faktor yang sangat menentukan. Menurut perspektif ekologi budaya unsur-unsur pokok adalah pola-pola perilaku (*behavior patterns*), yakni kerja (*work*), dan teknologi yang dipakai di dalam proses pengolahan atau pemanfaatan lingkungan.

Lebih jauh lagi Febrianto (2016) mengatakan bahwa studi ekologi budaya pertama-tama adalah mengenai “*the process of work, its organizations, its cycle and rhythms and its situational modalities*”. Titik perhatiannya adalah pada analisis struktur sosial dan kebudayaan. Dengan demikian, perhatian baru diarahkan pada lingkungan bilamana lingkungan mempengaruhi atau menentukan pola-pola tingkah laku atau organisasi kerja.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Febrianto (2016), ekologi budaya melihat pola perilaku adaptif dari manusia melalui kebudayaannya terhadap lingkungan alam di sekitarnya. Sebagaimana pendapat Abdoellah (2017) mengenai ekologi budaya, ia mengatakan faktor lingkungan tidak menentukan kemanusiaan. Bahkan, interaksi manusia dengan lingkungan melalui subsisten bekerja untuk menentukan dan memiliki pengaruh langsung terhadap lingkungan dalam tatanan sosial

dan budaya. Selain itu, ekologi budaya mencoba menerangkan bagaimana populasi manusia beradaptasi terhadap kondisi lingkungan dengan memfokuskan perilaku dalam inti kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka, penelitian “Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jeneberang” melihat bahwa posisi kebudayaan memiliki peranan penting untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam di lingkungan sekitar, khususnya dalam proses adaptasi dan keberlangsungan dari alam itu sendiri. Kesadaran akan kearifan lokal menjadi penting dalam pengelolaan tambang rakyat tradisional.

#### **b. Ekofilosofi *Deep Ecology*: Cara Baru Memahami Lingkungan**

Banyak ideology atau isme yang berkaitan dengan lingkungan yang akhirnya berkembang menjadi politik suatu Negara. Salah satu isme yang muncul menjadi politik lingkungan itu adalah *Movementisme*. Dalam ideology ini, tema ekologi yang disebut ekofilosofi atau ekosofi menjadi salah satu alat untuk memahami lingkungan saat ini.

Istilah *Deep Ecology*, sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ekologi ‘mendalam’ untuk membedakan dengan *Shallow Ecology* (ekologi ‘dangkal’) (Capra, 1997). *Deep Ecology* adalah sebuah aliran filsafat yang didirikan oleh filsuf Norwegia, Arne Naess di awal tahun 70 an. Aliran filsafat ini berkembang sangat pesat dan sekarang menjadi terkenal. Naess melihat bahwa kelompok gerakan

ekologi “dangkal” (*Shallow Ecology Movement*), menekankan pada pendapat bahwa pencemaran lingkungan dan penguasaan sumberdaya harus ditentang dan dilawan demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat industri. Kelompok ini oleh Naess dianggap sebagai suatu gerakan ekologi dangkal karena hanya mementingkan kelompok Negara industri dan bukan seluruh *ekosfer*. Sehingga interpretasi Negara industri berkaitan dengan lingkungan membolehkan mengekspor pencemaran ke Negara lain (Negara berkembang) dan mendirikan industri yang banyak menggunakan sumberdaya alam di Negara berkembang. Sebagai contoh disini adalah DDT yang sudah dilarang di USA sejak tahun 1968, dimana teknologi memproduksi DDT justru di ekspor ke Negara berkembang. Padahal DDT adalah salah satu dari sepuluh *insektisida organochlorin* yang dilarang di USA sejak tahun 1968 (Iudvik, 1980). Pelarangan ini terjadi setelah musibah yang dilaporkan Carson tahun 1962 dengan buku tulisannya yang berjudul *Silent Spring*, yaitu suatu tulisan dalam sejarah tentang betapa berbahayanya peptisida bagi kehidupan makhluk hidup. Sebagai tandingan terhadap gerakan itu, maka muncullah gerakan ekologi mendalam (*Deep Ecology Movement*) yang berusaha untuk mengubah paradigma secara radikal berkaitan dengan bagaimana memahami, menjelaskan, dan memperlakukan lingkungan sebagai satu kesatuan integral dalam proses kehidupan.

Sebagai sebuah aliran filsafat baru, paradigma *Deep Ecology* berbeda dalam memandang dunia jika dibanding dengan aliran filsafat sebelumnya, yaitu Ekologi 'Dangkal' (*Shallow ecology*). Paradigma baru ini dapat dikatakan sebagai suatu pandangan dunia yang *holistik*. Dunia dipahami sebagai suatu keseluruhan yang terpadu ketimbang suatu kumpulan bagian-bagian yang terpisah-pisah. Ia juga bisa disebut sebagai suatu pandangan *ekologis*.

Istilah ekologis ini dipahami dalam arti luas, yakni kesadaran yang mendalam yang mengakui kesaling-tergantungan fundamental semua fenomena dan fakta bahwa, sebagai individu dan masyarakat semuanya terlekat dalam dan bergantung secara mutlak pada proses siklus alam. Dalam pemikiran paradigma *deep ecology*, maka penilaian terhadap lingkungan hidup yang berupa sumberdaya alam hayati, tidak hanya memperhatikan faedah atau manfaat langsung pada manusia, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana memahami hak keberadaan (eksistensi) makhluk hidup yang lain. Ekosistem dipahami sebagai suatu system jaringan keseluruhan makhluk hidup dan manusia termasuk di dalamnya.

Dalam pemaknaan *Deep Ecology*, sifat holistik tidak berhenti pada pengertian hubungan fungsional antar bagian-bagian, di mana pada masing-masing bagian terjadi saling ketergantungan. Lebih dari pada itu segera perlu ditambahkan adanya faktor keterhubungan dengan basis lingkungan alamiah dan basis sosialnya. Ketika berpikir tentang sepeda motor misalnya, persepsi yang muncul tidak hanya sebatas pada sepeda

motor sebagai suatu keseluruhan fungsional dan karena itu mengerti kesaling-tergantungan bagian-bagiannya. Pandangan *Deep Ecology* mengenai sepeda motor mencakup pandangan holistik, tetapi segera ditambahkan persepsi tentang bagaimana sepeda motor tersebut terlekat dalam lingkungan alamiah dan sosialnya- dari mana didapat bahan mentahnya, bagaimana sepeda motor tersebut diproduksi secara massal, bagaimana pemakaiannya mempengaruhi lingkungan alamiah dan komunitas yang memakai, dan sebagainya.

Berbeda “ekologi dangkal” yang bersifat *antropocentris*, atau berpusat pada manusia, di mana manusia berada di atas atau di luar alam-manusia adalah sumber nilai dan alam dipandang bersifat instrumental atau hanya memiliki nilai guna. Ekologi ‘dalam’ tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiahnya. Benar-benar melihat dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental (system). Ekologi ‘dalam’ mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tidak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan.

Menurut Arne Naess (Sessions, 1985), ekologi ‘dalam’ dicirikan oleh pertanyaan-pertanyaan paradigmatik, yakni pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang fondasi-fondasi utama pandangan dunia dan cara hidup yang bersifat modern, ilmiah, industrial, berorientasi pertumbuhan dan materialistis. Semua pertanyaan mendasar ini kembali dipertanyakan

dari perspektif ekologis : dari perspektif hubungan kita satu sama lain, dengan generasi-generasi masa depan dan dengan jaringan kehidupan di mana kita adalah bagiannya.

Capra (1997) lebih jauh menyatakan bahwa ekologi pada akhirnya tidak lain adalah kesadaran spiritual dan religius, yaitu ketika jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaran di mana individu merasakan sesuatu rasa memiliki, dari rasa keberhubungan kepada kosmos sebagai suatu keseluruhan.

Berdasarkan hal di atas, dapatlah dinyatakan bahwa paradigma lama, Ekologi 'Dangkal' didasarkan pada nilai-nilai *antroposentris* (berpusat pada manusia), sedangkan paradigma baru, yakni Ekologi 'Dalam' didasarkan pada nilai-nilai *ekosentris* (berpusat pada bumi/alam atau ekosfer). Ekologi 'dalam' merupakan pandangan dunia yang mengakui nilai-nilai yang melekat pada kehidupan nonmanusia, mengakui eksistensi semua makhluk. Semua makhluk hidup adalah anggota komunitas-komunitas ekologis yang terkait bersama dalam suatu jaringan yang saling bergantung. Terganggunya salah satu anggota komponen komunitas akan menyebabkan terganggunya sistem secara keseluruhan.

Atas dasar inilah, maka pendekatan *deep ecology* menjadi salah satu pendekatan paradigmatis dalam kerangka penelitian "Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jeneberang".

### **c. Paradigma Ekologi Pembangunan Berkelanjutan**

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kawasan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dari area terbuka menjadi area terbangun atau dapat pula terbentuk dari kawasan tidak produktif menjadi kawasan produktif. Perubahan penggunaan lahan ini kalau tidak dipantau dan dievaluasi akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Daya dukung lahan ada batasnya, apabila kapasitas daya dukung lahan diluar batas maka sumberdaya alam pada lahan tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pada titik inilah, dalam rangka pembangunan diperlukan kesadaran ekologis yang tidak mengakibatkan lingkungan mengalami krisis (Gondokusumo, 2005).

Upaya pertumbuhan dan perkembangan “Tambang Rakyat Tradisional di Aliran Sungai Jeneberang, paradigma ekologi pembangunan berkelanjutan menjadi penting karena kriterianya dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pro Keadilan Sosial, artinya keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik (air, tanah, udara, sanitasi lingkungan, fasilitas sosial, transportasi), menghargai diversitas budaya, kesetaraan gender.
- b) Pro Ekonomi Kesejahteraan, artinya pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat (bukan hanya kaum elit), dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak negatif minimum terhadap lingkungan.

- c) Pro Lingkungan Berkelanjutan, artinya etika lingkungan non antroposentris (pandangan bahwa manusia tidak superior dan tidak melakukan penindasan terhadap makhluk hidup lainnya dan terhadap lingkungan) menjadi pedoman hidup masyarakat sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam yang vital (seperti air) dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.

Berdasarkan data WHO (2015) Aspek penting pada proses pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah aspek ekologi, tujuannya adalah menjamin ketersediaan sumberdaya alam yang selalu cukup, baik untuk sekarang maupun nantinya. Ketersediaan sumberdaya alam terkait dengan daya dukung lingkungan yang akan mempengaruhi berjalannya proses pembangunan, sehingga SDGs menjadikan ekologi sebagai pilar utama dibanding pilar yang lainnya. Suatu (proses) pembangunan mempengaruhi sistem ekologi demikian juga sebaliknya, pembangunan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi tujuan PBB merupakan tindak lanjut dari MDGs, salah satu tujuan dari 17 kriteria SDGs adalah masalah tanah dan air (termasuk didalamnya tambang).

Untuk menindak lanjuti tujuan MDGs tahun 2015 yang masih belum tuntas yaitu memberantas kemiskinan, maka PBB merumuskan agenda

SDGs dengan perhatian yang lebih pada keseimbangan lingkungan. Di Indonesia agenda SDGs saat ini sedang berusaha untuk mengatasi krisis sosial- ekologis, hal ini dapat dicermati bahwa krisis sosial-ekologi yang terjadi di Indonesia adalah akibat dari pembangunan yang masih bertumpu pada cara pikir antroposentris yang menjadikan alam sebagai target sasaran untuk dieksploitasi sedangkan paradigma pembangunan yang berdimensi ekosentrik di mana hubungan antara subyek dan obyek pembangunan bersifat ko-eksistensi masih belum diterapkan sepenuhnya meskipun konsep pembangunan berkelanjutan sudah disosialisasikan dimana mana.

Proses *sustainable development* harus selalu dijaga baik untuk sekarang maupun nantinya sehingga mutu lingkungan tidak rusak. Proses sistem dalam ekosistem diusahakan agar tetap terjadi secara berkelanjutan dalam keterkaitan keanekaragaman, kelestarian dan keserasian. Saat ini komponen lingkungan telah dipengaruhi oleh faktor yang merusak lingkungan seperti perilaku manusia yang hedonistik, pandangan yang terlalu antroposentris, keberpihakan terhadap kelompok dan golongan tertentu dan sebagainya. Adanya faktor yang merusak komponen lingkungan ini akan merubah proses sistem dalam suatu ekosistem, akhirnya mutu lingkungan akan merosot.

Brinkerhoff & Arthur (Shaliza, 2003) menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dapat dipahami melalui kelembagaan yang ada. Kelembagaan diartikan sebagai: (1) sistem yang berfungsi

dalam hubungan pada lingkungan mereka, (2) mengorganisasi dan mengatur entitas dimana harus ada kesesuaian antara struktur organisasi dan prosedurnya dengan tugas-tugas, produk- produk, orang, sumberdaya dan konteks yang mereka hadapi dan (3) memperhatikan lingkungan secara baik beserta perubahan sumberdaya, yang terkait juga dengan politik dan ekonomi untuk menciptakan pola kekuasaan dan insentif. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai keberlanjutan dan kemandirian pembangunan yang bergantung pada kekuatan dan kualitas institusi yang ada. Pembangunan yang berkelanjutan secara ekologi dipahami sebagai usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara sadar lingkungan dan berlaku adil kepada generasi yang akan datang (Keraf, 2002).

### **3. Ekologi Budaya**

Aktivitas pertambangan secara umum berkaitan dengan ekologi kebudayaan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan rujukan teori ekologi kebudayaan. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Beberapa para pakar biologi pada abad ke 18 dan 19 juga telah mempelajari bidang-bidang yang kemudian termasuk dalam ruang lingkup ekologi. Misalnya Anthony van Leeuwenhoek, yang terkenal sebagai pioner penggunaan mikroskop, juga pioner dalam studi mengenai rantai makanan dan regulasi populasi. Bahkan jauh sebelumnya, Hippocrates, Aristoteles, dan para

filosuf Yunani telah menulis beberapa materi yang sekarang termasuk dalam bidang ekologi.

Defenisi berkaitan dengan ekologi telah dikemukakan oleh beberapa pakar. Setiawan (2021) mengemukakan beberapa defenisi menurut para ahli sebagai berikut.

- 1) Menurut Ernst Haeckel, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya.
- 2) Krebs mengemukakan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi penyebaran dan jumlah dari organisme.
- 3) Pianka menyatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dan seluruh faktor fisik dan biologi yang mempengaruhi dan di pengaruhinya.
- 4) Lynn Margulis menyatakan bahwa studi ekonomi bagaimana manusia dapat membuat kehidupan. Studi ekologi bagaimana tiap binatang lainnya dapat membuat kehidupan.
- 5) Mike Nickerson juga menyatakan bahwa ekonomi tiga perlima dari ekologi sejak ekosistem menciptakan sumber serta membuang sampah, yang mana ekonomi menganggap dilakukan untuk bebas.

6) Menurut Ernest Haeckel, ekologi ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk hubungan antara komponen organik serta anorganik di sekitar lingkungannya.

Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *oikos* dan *logos*. *Oikos* artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi semula ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Saat ini ekologi lebih dikenal sebagai "ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam".

Bronfenbrenner (Purwanto, 2000: 97), berpendapat bahwa untuk memahami perkembangan manusia, kita harus mempertimbangkan seluruh sistem ekologi dimana pertumbuhan itu terjadi. Dalam teori ini lingkungan menjadi konteks perkembangan dari seseorang. Sistem Ekologi ini terdiri dari lima subsistem terorganisir secara sosial yang membantu mendukung dan menuntun pertumbuhan manusia. Mulai dari Mikrosistem, Mesosistem, Exosistem, Makrosistem, dan Kronosistem yang mengacu pada hubungan antara perkembangan seseorang dan

lingkungan sekitar. Konsep dari lima subsistem ini sangat dibedakan dari lingkungan perspektif perkembangan seseorang.

- 1) Mikrosistem. Mikrosistem adalah suatu pola kegiatan, peran sosial, dan hubungan interpersonal yang dialami oleh perkembangan seseorang dalam interaksi yang lebih kompleks dengan lingkungan secara langsung. Contohnya meliputi lingkungan seperti keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan tempat kerja.
- 2) Mesosistem. Mesosistem terdiri dari hubungan dan proses yang terjadi antara dua atau lebih lingkungan yang berisi perkembangan seseorang (misalnya, hubungan antara rumah dan sekolah, sekolah dan tempat kerja). Dengan kata lain, sebuah mesosistem adalah sebuah sistem dari Mikrosistem.
- 3) Exosistem. Exosistem terdiri dari hubungan dan proses yang terjadi antara dua atau lebih lingkungan, dimana satu dari lingkungan yang ada tidak mempengaruhi perkembangan seseorang, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi proses dalam lingkungan langsung di mana kehidupan perkembangan seseorang itu terjadi. (Misalnya, untuk anak, hubungan antara rumah dan tempat kerja orang tua, karena orang tua, hubungan antara sekolah dan lingkungan kelompok sebaya, karena anak).
- 4) Makrosistem. Makrosistem terdiri dari pola menyeluruh dari mikrosistem, mesosistem, dan karakteristik budaya exosistem

atau subkultur yang diberikan, dengan referensi khusus pada sistem kepercayaan, tubuh pengetahuan, sumber daya material, adat istiadat, gaya hidup, struktur kesempatan, bahaya, dan pilihan kehidupan, tentu saja yang tertanam di masing-masing sistem yang lebih luas.

- 5) Kronosistem. Sebuah kronosistem meliputi perubahan atau konsistensi dari waktu ke waktu tidak hanya dalam karakteristik orang tersebut, tetapi juga dari lingkungan di mana orang itu hidup (misalnya, perubahan selama hidup dalam struktur keluarga, status sosial ekonomi, pekerjaan, tempat tinggal, atau gelar dan kemampuan dalam kehidupan sehari-hari).

Kajian ekologi kemudian mengalami berbagai perkembangan, termasuk dalam studi antropologi yang dikenal dengan teori ekologi budaya. Studi literatur penelitian ini menunjukkan bahwa teori ekologi budaya dipelopori oleh Julian H. Steward (Purwanto, 2000: 71-72) pada tahun 1955, kemudian mulai berkembang pada tahun 1970-an. Menurutnya, terdapat bagian inti dari sistem budaya yang sangat responsif terhadap adaptasi ekologis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses penyesuaian yang terjadi pada tekanan ekologis, secara langsung akan mempengaruhi unsur inti dari struktur sosial.

Geertz (Poerwanto, 2000: 76-77) menyatakan, melalui inti kebudayaan, analisis ekologi akan mampu menunjukkan konstelasi unsur-unsur penting yang paling erat kaitannya dengan penyelenggaraan atau

pengaturan kehidupan dan penyusunan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan, secara empirik, pola-pola sosial, politik dan agama diduga erat kaitannya dengan pengaturan pola-pola kehidupan dan ekonomi.

Hubungan antara manusia, kebudayaan dan lingkungan telah terkonstruksi sejak lama dan berkembang secara kompleks. Bakker, S.J. (Poerwanto, 2000: 78) mengemukakan bahwa alam sekitar tidak hanya memberikan corak lahir kepada kebudayaan, melainkan juga mempengaruhi pola pikiran, menentukan perasaan, perangai dan kesenian. Lebih lanjut dinyatakan, dalam daerah sukar atau banyak tantangan alam, kebudayaan merupakan simbiose antara manusia dan alam. Faktor-faktor kebudayaan membentangkan interaksi dan interplay antara manusia dan alam yang begitu kompleks.

Pola simbiose ini dapat dilihat pada terbentuknya relasi penambang tipe galian C pada pertambangan rakyat di sungai Jeberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sungai Jeneberang menjadi ruang alam terbuka ladang mata pencaharian yang membentuk pola pengetahuan masyarakat penambang. Hal ini kemudian membentuk semacam pola bertahan masyarakat penambang di tengah gempuran perkembangan kota dan teknologi pertambangan moderen dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk mencapai suatu ekosistem yang seimbang, stabil, dan dinamis, dalam berlangsungnya sistem ekologi yang membentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya, harus mengikuti asas-asas

tertentu dalam ekosistem. Soemarwoto (2004: 4-7) menjelaskan beberapa asas-asas tersebut sebagai berikut.

1) Asas keanekaragaman

Makhluk hidup, baik itu nabati maupun hewani yang ada di alam, baik yang hidup di darat maupun di air, jenis dan jumlahnya beraneka ragam macam. Tiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Tiap makhluk hidup tidak dapat hidup dengan berkembang terus sehingga mendesak keberadaan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu ada yang mengontrol atau yang memangsanya. Dengan keanekaragaman jenis makhluk hidup, secara alamiah, membutuhkan yang lainnya.

2) Asas kerja sama

Terwujudnya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Di antara tumbuh-tumbuhan dengan sesamanya, diantara tumbuh-tumbuhan dengan binatang, di antara binatang dengan binatang atau diantara binatang dengan manusia, terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat menunjang keseimbangan dan kestabilan.

3) Asas persaingan

Selain ada kerja sama, dalam ekosistem ada persaingan. Asas persaingan berfungsi mengontrol pertumbuhan suatu komponen yang terlalu pesat, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam persaingan terjadi proses seleksi, dimana komponen yang serasi akan

menciptakan keseimbangan dalam batas tertentu. Secara alamiah, bakteri, hama dan binatang pengganggu merupakan proses persaingan dalam menciptakan kestabilan dalam ekosistem.

#### 4) Asas interaksi

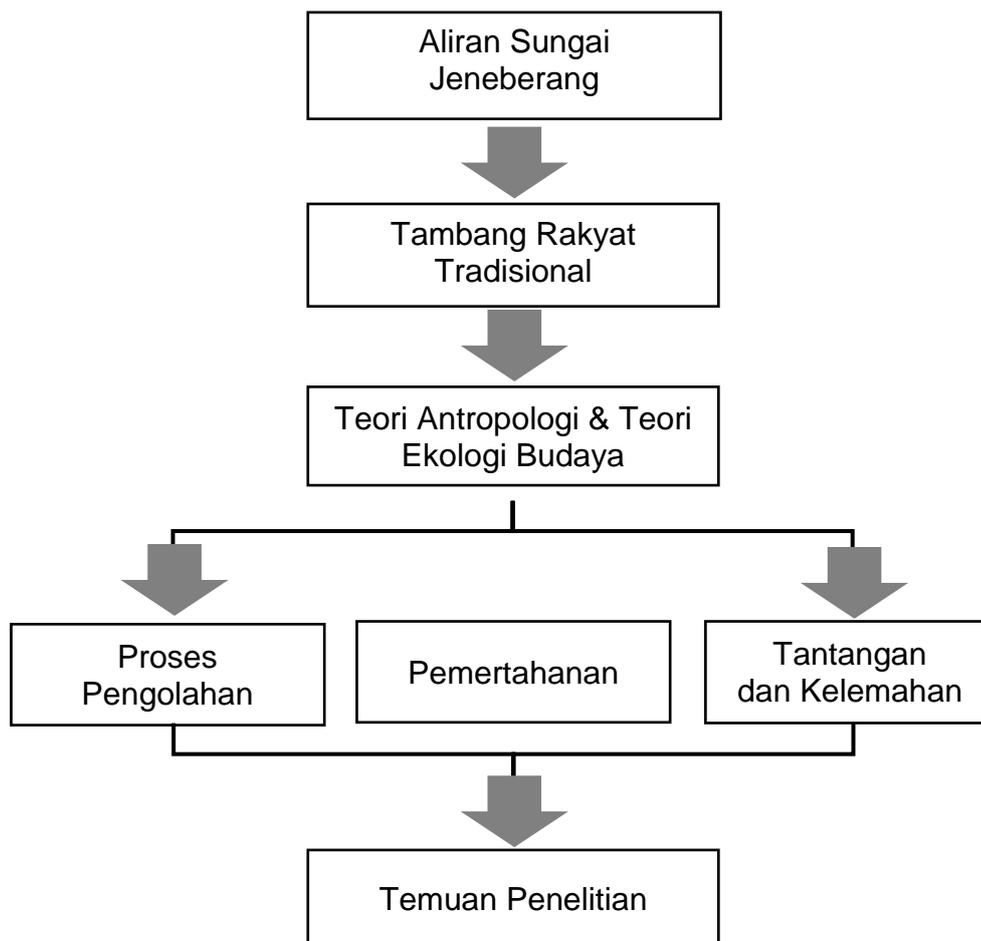
Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam ekosistem terjadi karena adanya hubungan timbal arah antara makhluk hidup dengan sesamanya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup di samping mempengaruhi perkembangan dan kualitas lingkungan, juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tanpa adanya interaksi, suatu makhluk hidup disatu pihak dan lingkungan dipihak lain akan ada terdesak, sehingga akan timbul ketimpangan dan keguncangan, yang pada akhirnya akan terjadi kehancuran.

#### 5) Asas kesinambungan

Makhluk yang beranekaragam yang menjalani proses kerja sama, persaingan dan adanya interaksi di antara makhluk hidup serta lingkungannya berlangsung secara terus menerus. Dengan kata lain, hubungan-hubungan tersebut harus berlangsung secara konsisten dan kontiniu. Apabila terputusnya jalinan kehidupan, akan terjadi keguncangan yang dapat menimbulkan kehancuran.

#### D. Alur Pemikiran

Penelitian ini berorientasi untuk mengetahui dan menganalisis proses pengolahan tambang rakyat di Aliran Sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Aspek lainnya yang ingin dikaji ialah upaya penambang tradisional dapat bertahan dari pola penambangan moderen serta untuk mengetahui tantangan dan kelemahan proses tambang tradisional di sungai Jeneberang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Lebih detail alur pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Bagan Alur Pemikiran